

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan perekonomian negara.

Semakin berkembang dan membaiknya akuntansi sektor publik di Indonesia ini, akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban dan menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan bagi lembaga pemerintah untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan kinerjanya kepada publik. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dalam kebijakan pemerintah daerah pada kehidupan sekarang ini sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas yang digunakan sebagai gambaran kinerja kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan yang telah melakukan kegiatan dalam lingkup pemerintah daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya sebagai kepercayaan masyarakat dalam mengatur pemerintah yang baik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan

mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menurut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Bentuk nyata dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik adalah dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nurilla, 2014).

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa mejadikan keuangan itu sebagai sumber informasi

untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Tujuan dari laporan keuangan tersebut sendiri adalah untuk memberikan informasi yang terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang mempunyai manfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan akuntansi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga harus bersifat transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Unsur-unsur dalam laporan keuangan yang akan disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), auditor independen akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selain itu penyajian laporan keuangan harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat Opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tabel 1. 1 Hasil Opini Audit Kabupaten Bengkalis

| Tahun | Opini Audit |
|--------------|---|
| 2012 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) |
| 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2019 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2020 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2021 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2022 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2023 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2024 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

Sumber: (<https://www.bpk.go.id/>)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih prestasi gemilang dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah tahun 2024 secara berturut-turut sejak 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Riau. Meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan beberapa kelemahan terkait pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Hal ini telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah terkait, untuk mendorong pengembangan sistem pengendalian internal yang memadai, serta penerapan *Governance*, *Risk* dan *Compliance*. Permasalahan yang ditemukan oleh BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum dilaksanakan dengan tertib antara lain pada bagian adanya kelemahan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi, pertanggungjawaban belanja barang dan jasa belum sepenuhnya diselenggarakan dengan tertib, kekurangan volume pekerjaan fisik, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya diselenggarakan dengan tertib.

Hal pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah ialah Sistem Pengendalian Intern pemerintah itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam PP tersebut sistem pengendalian internal memiliki tujuan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai dengan melalui; Kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pada penelitian Binawati & Nindyaningsih (2022) mendapatkan bahwa pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi yang lebih baik memiliki pengaruh yang dalam menentukan keterandalan laporan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Gustina & Afrida (2021) Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal kedua yang dapat mempengaruhi laporan keuangan ialah Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam mendukung kualitas penyajian sebuah laporan keuangan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas yang dapat memahami secara rinci akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah. Pada penelitian Leiwakabessy (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan kualitas laporan keuangan yang

disajikan pemerintah daerah akan semakin baik ketika sumber daya manusia yang menghasilkan laporan tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Sedangkan pada penelitian Fauziyah (2019) kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.

Hal ketiga yang dapat mempengaruhi laporan keuangan ialah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat juga mengakibatkan perubahan signifikan terhadap akuntansi. Peranan TI terhadap perkembangan akuntansi pada setiap zaman berbeda-beda. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Kemajuan TI mempengaruhi perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Pada penelitian Ayem & Amahala (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan para pekerja dengan tepat dan cepat dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan pada penelitian Rahayu, S., & Sundari, H. (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD. Artinya jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik belum tentu penerapan terhadap kualitas laporan keuangan akan baik pada SKPD.

Hal terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi yang baik akan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Pada penelitian Jauhari, Hazisma, & Dewata (2021) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Temuan ini membuktikan standar akuntansi pemerintah menjadi salah satu mekanisme pengendalian dalam pembuatan laporan keuangan agar

dapat disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sedangkan pada penelitian Rahayu & Kanita (2022) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Artinya jika penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah semakin baik, belum tentu diikuti dengan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik pada OPD.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf diatas. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis?

5. Apakah sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis?

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk menguji variabel Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kuesioner disebarikan kepada Kepala dan staff Sub Bagian Keuangan, Bendahara SKPD, Bendahara setiap sub bagian, Tenaga Akuntansi dan Pengelola aset pada SKPD yang beralamat kantor di Kota Bengkalis.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kajian literatur mengenai pengaruh sistem pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama untuk faktor sistem pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi instansi/perusahaan mengenai pentingnya sistem pengendalian Intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.